

## INTISARI

### **ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK VETO OLEH ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA – BANGSA TERHADAP UPAYA *PEACEMAKING* DAN *PEACEKEEPING* (STUDI KASUS SURIAH)**

**Finzha Iswara Mahendra<sup>1</sup>, Sigit Riyanto<sup>2</sup>**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang yang mendasari Rusia dan Cina selaku anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mempunyai tanggungjawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dalam memberikan hak vetonya terhadap upaya *peacemaking* dan *peacekeeping* yang digunakan untuk mengatasi kasus Suriah serta tindakan yang dapat ditempuh oleh PBB jika Dewan Keamanan PBB mengalami *deadlock* dalam membuat keputusan.

Penelitian hukum dalam Tesis ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode normatif dengan teknik deskriptif dengan menguraikan latar belakang Rusia dan Cina dalam memberikan hak vetonya terhadap upaya *peacemaking* dan *peacekeeping* dalam kasus Suriah serta upaya yang dapat ditempuh oleh Majelis Umum PBB saat Dewan Keamanan PBB mengalami *deadlock*. Sumber data dalam penelitian bersumber pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan dua kesimpulan. *Pertama*, penggunaan hak veto oleh Rusia dan Cina terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan upaya *peacemaking* dan *peacekeeping* dilatarbelakangi oleh keinginan Rusia dan Cina untuk tetap mempertahankan penyelesaian secara diplomatik namun upaya tersebut dinilai kurang efektif. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya penggunaan hak veto oleh Dewan Keamanan PBB berlandaskan kepada Piagam PBB sehingga penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB dapat sejalan dengan fungsi dan tujuan Piagam PBB. *Kedua*, Dengan penerapan *Uniting for Peace*, Majelis Umum PBB membentuk IIIM dalam mengatasi kasus Suriah pasca kegagalan untuk membawa kasus Suriah kepada Mahkamah Internasional. Namun, penerapan *Uniting for Peace* tetap mempunyai batasan – batasan yang harus diperhatikan secara seksama.

***Kata Kunci: Piagam PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum, Hak Veto, Peacemaking, Peacekeeping, Uniting for Peace, Deadlock, Suriah***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Klaster Hukum Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Profesor Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## ABSTRACT

### **ANALYSIS OF THE USE OF VETO RIGHTS BY PERMANENT MEMBERS OF THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL ON PEACEMAKING AND PEACEKEEPING EFFORTS (CASE STUDY OF SYRIA)**

**Finzha Iswara Mahendra<sup>3</sup>, Sigit Riyanto<sup>4</sup>**

*This research aims to find out the background underlying Russia and China as permanent members of the UN Security Council who have the responsibility to maintain international peace and security in giving their veto rights to peacemaking and peacekeeping efforts used to overcome the Syrian case and the actions that can be taken by the UN if the UN Security Council is deadlocked in making decisions.*

*The legal research in this thesis is a legal research that uses normative methods with descriptive techniques by describing the background of Russia and China in giving their veto rights to peacemaking and peacekeeping efforts in the Syrian case as well as efforts that can be taken by the UN General Assembly when the UN Security Council is deadlocked. The source of data in the research is secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Then the data is analyzed with a qualitative method.*

*Based on the research that has been conducted, the author can provide two conclusions. First, the use of veto rights by Russia and China against the draft UN Security Council resolutions relating to peacemaking and peacekeeping efforts is motivated by Russia and China's desire to maintain a diplomatic settlement but these efforts are considered less effective. Based on this, the use of veto rights by the UN Security Council should be based on the UN Charter so that the use of veto rights by permanent members of the UN Security Council can be in line with the functions and objectives of the UN Charter. Second, with the application of Uniting for Peace, the UN General Assembly formed IIIM in overcoming the Syrian case after the failure to bring the Surah case to the International Court of Justice. However, the application of Uniting for Peace still has limitations that must be considered carefully.*

**Keywords: United Charter, Security Council, General Assembly, Veto Right, Peacemaking, Peacekeeping, Uniting for Peace, Deadlock, Syria**

---

<sup>3</sup> Master of Law Student, International Law Cluster, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

<sup>4</sup> Professor at Master of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.